



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKARTA 10110TROMOL POS NOMOR 1020TELP
(021) 3843348,3810350,3457661 FAKSIMILE 3810361

20 Juni 2022

Nomor : B-60/Bua.3/KU.00/06/2022
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Data User SAKTI Modul Aset tetap
dan Modul GL Pelaporan

- Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Selaku Penanggungjawab Koordinator Wilayah Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA-W) sebagai Koordinator Wilayah
DIPA 005.003
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Selaku Penanggungjawab Koordinator Wilayah Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA-W) sebagai Koordinator Wilayah
DIPA 005.004
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Selaku Penanggungjawab Koordinator Wilayah Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA-W) sebagai Koordinator Wilayah
DIPA 005.005
5. Sekretaris Badan Pengawasan
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan Peradilan
7. Para Sekretaris Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam
Selaku Penanggungjawab Satuan Kerja Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA-W) sebagai Koordinator Wilayah
DIPA 005.001

Sehubungan dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-64/PB.6/2020 tentang User SAKTI Para Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA, dengan ini diminta kepada saudara untuk mengirimkan data User Pengguna Modul Aset Tetap dan Modul GL Pelaporan User Tingkat Eselon I dan User Tingkat Wilayah mengajukan permohonan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui Tingkat K/L sebagai Kompilator dengan mengisi Formulir Pendaftaran dan mengupload SK Penetapan Pengguna Aplikasi SAKTI pada link <https://bit.ly/FormPendaftaranUserSAKTI2022>.

Data User SAKTI tersebut kiranya dapat kami terima paling lambat tanggal 22 Juni 2022. Seluruh format pengisian dokumen dapat diakses dan diunduh pada <https://bit.ly/kompilatorSAKTI>.

Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI

Dedi Waryoman
NIP. 19680817 198903 1 007

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Panitera Mahkamah Agung;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung;
5. Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 1-2, JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710; TELEPON: 021-3847068, 3449230 PSW. 5500; FAKSIMILE (021) 3864776; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-64/PB.6/2022 14 Juni 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : User SAKTI Para Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA.

Yth. Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Keuangan dan BMN/Kepala Pusat Keuangan pada
Kementerian Negara/Lembaga

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik Dalam *Piloting* SAKTI, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pengguna SAKTI pada Satker wajib memiliki hak akses. Hak akses SAKTI hanya diberikan kepada pengguna sesuai dengan kewenangannya dan setiap pengguna bertanggung jawab atas kepemilikan dan penggunaan kode akses.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, K/L membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan/atau UAPA.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan kompilasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan/atau UAPA, K/L mengajukan user penyusun laporan keuangan kompilator kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling lambat tanggal 24 Juni 2022 sesuai format terlampir.
4. Kebutuhan pengguna SAKTI pada unit tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan/atau UAPA meliputi modul Aset Tetap dan modul GL dan Pelaporan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:
Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan



LAMPIRAN I

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor : S-64/PB.6/2022

Tanggal : 14 Juni 2022

DAFTAR KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Kementerian Pariwisata RI
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
34.	Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No.	Kementerian Negara/Lembaga
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN II

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor : S-64/PB.6/2022

Tanggal : 14 Juni 2022

Ketentuan Pendaftaran User Penyusun LK Kompilasian Aset dan Pelaporan Satker SAKTI

1. Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi bahwa seluruh pengguna SAKTI wajib memiliki Kode Akses.
2. K/L melakukan *mapping* kompilator Aset dan Pelaporan untuk mengetahui hubungan kompilasi antar Satker/Kantor sampai dengan tingkat Kementerian.
3. K/L menetapkan dan mendaftarkan user pengguna SAKTI untuk masing-masing operator tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan/atau UAPA.
4. K/L mengajukan surat permohonan pengguna SAKTI kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Surat permohonan tersebut dilampiri:
 - a. Surat Keputusan Penetapan Pengguna SAKTI tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan/atau UAPA (dalam format *file pdf* dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang);
 - b. *Form* Pendaftaran Pengguna SAKTI (dalam format *file pdf* dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan format *file excel*);
 - c. *Form Mapping* Kompilasian Aset dan Pelaporan sesuai yang dimaksud dalam angka 2.
5. Seluruh format dokumen dapat diakses dan diunduh pada **<https://bit.ly/kompilatorSAKTI>**.